

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI
UTARA NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

(Studi Kasus Desa Tambalang dan Desa Banyu Hiran)

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik



OLEH :

HILMA MUKIMAH

NPM: 2022186

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)

AMUNTAI

2026

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama :

Nama : Hilma Mukimah
NPM : 2022186
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (Studi Kasus Desa Tambalang dan Desa Banyu Hirang).**

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan sepenuhnya kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbing skripsi pada program studi administrasi publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Amuntai, 2 April 2026

Pembimbing I


Drs. H. Arpandy, M.A.P.
NUPTK. 8553741642130083

Pembimbing II


Djayeng Turano Gunade, S.Sos., M.A.P.
NUPTK. 1162761662130163

Mengatahui

Ketua Program Studi Administrasi Publik



Ahmad Baihaqi, S.Sos., M.A
NIK. 19921104 2015091 021

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Khususnya, rasa syukur yang tak terhingga penulis sampaikan atas nikmat kesehatan yang telah di berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (Studi Kasus Desa Tambalang dan Desa Banyu Hirang)”**. Dalam proses penyusunan proposal skripsi ini, banyak sekali sumbangan pikiran dan pemberian data yang penulis dapatkan dari berbagai pihak.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Reno Affrian, S. Sos., M.AP., CIQnR., CIQaR. Selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
2. Bapak Drs. H. Arpandi, M.A.P. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan, dan bimbingan kepada penulis sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Djayeng Turano Gunade, S.Sos., M.A.P. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan, dan bimbingan kepada penulis sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Muhammad Haitami selaku pengurus Tempat Pengelolaan Sampah 3R Suka Maju Desa Tambalang.
5. Bapak Supriadi selaku pengurus Tempat Pengelolaan Sampah 3R KSM Cahaya Pelangi Desa Banyu Hirang.

6. Seluruh dosen beserta staf tata usaha beserta jajarannya yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
7. Kedua orang tua tercinta, kaka tersayang dan seluruh keluarga saya yang sudah mendukung dan mendoakan saya dalam penyelesaian proposal skripsi.
8. Semua teman-teman saya yang sudah membantu dan menemani saya dalam proses penyusunan proposal skripsi.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan baik itu dari segi pengetahuan, keterampilan, kemampuan, pengalaman, maupun materi yang didapat. Oleh karena itu, penulis mengharapkan pendapat, saran serta bimbingan dari pihak terkait untuk pengembangan kedepannya. Semoga segala bantuan, bimbingan dan pengarahan yang diberikan menjadi amal ibadah dan mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Amuntai, Maret 2026

Penulis,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hasil Penelitian Terdahulu	8
B. Tinjauan Teoritis	10
C. Kerangka Pemikiran	22
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	24
B. Pendekatan Penelitian.....	24
C. Tipe Penelitian.....	25
D. Data dan Sumber Data.....	26
E. Definisi Operasional Variabel	28
F. Teknik Pengumpulan Data.....	29
G. Teknik Analisis Data	31
H. Uji Kredibilitas Data	32
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Tabel Informan.....	27
Tabel 3. 2 Desain Operasional Penelitian	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	23
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sampah adalah benda atau barang yang sudah tidak terpakai lagi dan tidak berguna karena aktivitas alam maupun manusia. Sampah dapat berasal dari berbagai sumber, seperti rumah, pertanian, tempat kerja, bisnis, rumah sakit, dan pasar. Berdasarkan jenisnya, sampah dapat dibedakan menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah berasal dari bahan alami serta mudah terurai, sementara itu sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai secara alami.

Salah satu masalah terbesar yang dihadapi masyarakat saat ini adalah pengelolaan sampah, jumlah sampah yang dihasilkan terus meningkat seiring dengan kemajuan ekonomi dan pertambahan jumlah penduduk. Penumpukan sampah ini dapat mengakibatkan sejumlah masalah besar, mulai dari pencemaran lingkungan hingga ancaman terhadap kesehatan masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Setiap kota atau desa memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri dari perbedaan ini menunjukkan seberapa baik pengelolaan sampah di setiap daerah.

Undang-Undang nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah menyatakan bahwa Undang-Undang ini memberikan landasan yang kokoh bagi pemerintah daerah untuk mengelola sampah. Mencakup prinsip pengurangan sampah, melalui pendauran ulang, pemanfaatan kembali, pembatasan timbulan sampah, serta membagi kewenangan antara pemerintah

pusat, daerah produsen dan masyarakat. Ditingkat daerah, pengelolaan sampah juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan sampah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah, serta mendorong penerapan konsep 3R.

Tempat Pengelolaan Sampah dengan konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) merupakan suatu fasilitas yang dirancang untuk mengelola sampah secara lebih efektif dan ramah lingkungan. Di tempat ini dilakukan berbagai kegiatan, mulai dari pengumpulan sampah dari masyarakat, pemilahan berdasarkan jenisnya, hingga proses pengolahan dan pemanfaatan kembali sampah tersebut. Konsep 3R sendiri menekankan pada upaya mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan (*reduce*), menggunakan kembali barang yang masih layak pakai (*reuse*), serta mendaur ulang sampah menjadi produk baru yang bermanfaat (*recycle*). Keberadaan TPS 3R sangat penting dalam mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Pemerintah mengembangkan TPS berbasis 3R dengan tujuan utama untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Dengan adanya TPS 3R, sampah yang berasal dari masyarakat tidak langsung dibuang, melainkan terlebih dahulu dipilah antara sampah organik dan anorganik. Sampah organik biasanya diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik dapat didaur ulang atau dimanfaatkan kembali menjadi barang bernilai ekonomi.

Desa Tambalang, Kabupaten Hulu Sungai Utara pada awalnya menghadapi permasalahan dalam pengelolaan sampah yang tidak berjalan dengan baik, terlihat dari belum tersedianya sistem pengelolaan yang terstruktur dan berkelanjutan. Kondisi ini mendorong pemerintah desa untuk melakukan upaya perbaikan melalui pembentukan Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) berbasis 3R yang diberi nama “Suka Maju” pada tahun 2025, pembentukan TPS 3R ini sebagai tujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah, menjaga kebersihan lingkungan, serta menimbulkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik. TPS 3R dilaksanakan melalui sejumlah proses, yaitu pengumpulan dan pemilahan sampah, Petugas pengumpul sampah mengambil sampah dari tempat sampah yang tersedia, sampah kemudian dipilah berdasarkan jenisnya di TPS 3R.

Tempat pengelolaan sampah 3R kelompok swadaya masyarakat (KSM) cahaya pelangi Desa Banyu Hirang di bentuk pada tahun 2018 sebagai respons terhadap permasalahan sampah yang semakin meningkat di lingkungan masyarakat, sebelum adanya pengelolaan sampah yang terorganisir masyarakat masih melakukan pengelolaan sampah secara sederhana, seperti dibakar atau dibuang sembarangan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kebersihan lingkungan. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan dampak buruk dari pengelolaan sampah yang tidak tepat, pemerintah desa bersama masyarakat mulai menyadari pentingnya pengelolaan sampah yang lebih terarah dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dibentuklah Tempat Pengelolaan Sampah 3R (KSM) “Cahaya Pelangi”

sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada di desa tersebut.

Kegiatan tempat pengelolaan sampah dengan konsep 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) di kedua desa tersebut telah berjalan secara rutin dan telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan program tersebut belum berjalan optimal.

Adapun fenomena-fenomena yang ditemukan peneliti pada saat observasi awal tentang Tempat Pengelolaan Sampah 3R Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Tambalang dan Desa Banyu Hiran) sebagai berikut :

1. Desa Tambalang (TPS 3R Suka Maju)

- a. Tidak adanya sosialisasi mengenai pengelolaan sampah dengan konsep 3R, akibatnya banyak masyarakat yang masih membuang sampah ke sungai.
- b. Sarana pengelolaan sampah tidak ada sehingga pemilahan dilakukan secara manual oleh petugas, membuat hasil pemilahan tidak maksimal.
- c. Kurangnya koordinasi antara pemerintah desa, pengelola TPS 3R, dan masyarakat hal ini menyebabkan pelaksanaan pengelolaan TPS 3R tidak berjalan optimal.

2. Desa Banyu Hiran (TPS 3R KSM Cahaya Pelangi)

- a. Keterbatasan tenaga kerja, di mana jumlah petugas TPS 3R tidak sebanding dengan volume sampah yang harus dikelola, menyebabkan

proses pemilahan dan pengelolaan sampah tidak dapat dilakukan secara optimal.

- b. Kurangnya sosialisasi mengenai pengelolaan sampah dengan konsep 3R menyebabkan masyarakat tidak memahami sepenuhnya tentang tempat pengelolaan sampah 3R.
- c. Keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia tidak sebanding dengan volume sampah yang terus meningkat sehingga berpotensi menimbulkan penumpukan sampah.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, difokuskan pada Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Desa Tambalang dan Desa Banyu Hirang). Maka yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini menurut George C. Edwards III (Reno Affrian 2023) yaitu sebagai berikut :

- 1. Komunikasi
- 2. Sumber Daya
- 3. Disposisi (Sikap Pelaksana)
- 4. Struktur Birokrasi

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian yang telah ditetapkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Desa Tambalang dan Desa Banyu Hirang)?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Desa Tambalang dan Desa Banyu Hirang)?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Desa Tambalang dan Desa Banyu Hirang).
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Desa Tambalang dan Desa Banyu Hirang).

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah menggunakan konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Hasil penelitian ini dapat membantu memahami bagaimana suatu program pemerintah di laksanakan di tingkat desa, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan hambatan dalam pelaksanaannya, dengan adanya

penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa atau peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat praktis

hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi pemerintah desa, Pengelola TPS 3R, dan masyarakat. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk melihat sejauh mana pengelolaan sampah yang telah dilaksanakan serta mengetahui kendala yang dihadapi di lapangan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar dalam memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pengelolaan sampah agar berjalan lebih optimal. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan sampah sehingga masyarakat terdorong untuk lebih aktif dalam memilah dan mengelola sampah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Widia Putri (2023), dengan judul **"Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Daerah Aliran Sungai Kecamatan Haur Gading (Studi Kasus Desa Palimbangan dan Desa Palimbangan Gusti)"**. Permasalahan yang ada di Desa Palimbangan yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat disebabkan karena minimnya sosialisasi, minimnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah. Sedangkan pada masyarakat Desa Palimbangan Gusti kurangnya kesadaran pengetahuan masyarakat disebabkan karena minim sosialisasi, faktor sumber daya manusia dan sarana prasarana, sehingga mengakibatkan air sungai keruh dan tercemar. Metode penelitian ini deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Daerah Aliran Sungai Kecamatan Haur Gading (Studi Kasus Desa Palimbangan dan Desa Palimbangan Gusti) secara umum belum optimal, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator yang belum berjalan dengan baik di Desa palimbangan dan Desa Palimbangan Gusti yaitu tujuan kebijakan, ukuran keberhasilan, sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran, dan organisasi formal. Sedangkan indikator yang sudah berjalan

dengan baik yaitu organisasi informal, respon implementor, sikap menerima/menolak, koordinasi antar organisasi, kerjasama antar organisasi, kondisi masyarakat dan dukungan pemerintah. Faktor pendorong implementasi yaitu adanya komitmen dari pelaksana dan faktor penghambat keberhasilan implementasi adalah, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, minimnya sosialisasi dan kurangnya fasilitas pengelolaan sampah

2. Penelitian yang dilakukan oleh Supihadi (2022) dengan judul **"Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan"**. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana kebijakan daerah tersebut dilaksanakan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya di lapangan. Latar belakang penelitian ini menyoroti masalah urbanisasi dan pertumbuhan penduduk di Kecamatan Paringin yang memicu peningkatan volume sampah secara drastis, di mana pada tahun 2021 tercatat produksi sampah mencapai 42 ton per hari, namun hanya sekitar separuhnya yang mampu terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dalam studi ini menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan dari Mazmanian dan Sabatier yang mencakup tiga variabel utama, yakni karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan variabel lingkungan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Paringin masih menghadapi berbagai kendala serius. Permasalahan utama yang teridentifikasi meliputi keterbatasan armada pengangkut sampah yang menyebabkan keterlambatan waktu angkut, serta lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah, khususnya peran Satpol PP dalam menegakkan sanksi tegas terhadap pelanggar aturan kebersihan. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat yang masih cenderung membuang sampah ke sungai atau membakarnya di sekitar pemukiman menjadi faktor penghambat yang signifikan.

B. Tinjauan Teoritis

1. Implementasi

Menurut Reno Affrian (2023:27) Implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan proses yang begitu kompleks, bahkan tidak jarang bermuatan politis karena adanya intervensi berbagai kelompok kepentingan.

Menurut Kendi (2024:1) implementasi adalah memahami apa yang senyata-nya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Fokus perhatian implementasi kebijakan menyangkut kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara yang mencaku, baik usaha-usaha untuk mengadminstrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut Jones dalam Engkus (2022:188) implementasi merupakan proses yang penting dalam proses kebijakan, dan tak terpisahkan dari proses formulasi kebijakan.

Alasan implementasi menjadi sangat penting adalah:

- a) Tanpa implementasi kebijakan tak akan bisa mewujudkan hasilnya.
- b) Implementasi bukanlah proses yang sederhana, tetapi sangat kompleks dan rumit.
- c) Benturan kepentingan antar aktor baik administrator, petugas lapangan, maupun sasaran sering terjadi.
- d) Selama implementasi sering terjadi berbagai interpretasi atas tujuan, target maupun strateginya.
- e) Implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel, baik variabel individual maupun organisasional.
- f) Dalam prakteknya sering terjadi kegagalan dalam implementasi.
- g) Banyak kegagalan dalam implementasi kebijakan telah memunculkan kajian baru dalam studi kebijakan yaitu studi implementasi kebijakan.
- h) Guna menilai keberhasilan atau kinerja sebuah kebijakan maka dilakukan evaluasi kebijakan.

Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Purwanto & Sulistyastuti (2015:21).

2. Kebijakan Publik

a. Pengertian

Menurut Stone dalam Degdo suprayitno, dkk (2024:11) Kebijakan publik pada dasarnya merupakan pemikiria rasional untuk mencapai suatu

tujuan yang ideal seperti keadilan, efisien, keamanan, kebebasan, dan berbagai tujuan lainnya dari masyarakat itu sendiri.

Menurut Aderson dalam Isnaini Rodiyah, dkk (2022:3) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh bandan dan pejabat pemerintah, Anderson mengimplikasikan kebijakan publik sebagai berikut :

- 1) Setiap pendekatan harus memiliki poin atau tujuan tertentu yang ingin dicapai.
- 2) Strategi terdiri dari serangkaian langkah atau contoh kegiatan yang diprakarsai oleh otoritas pemerintah.
- 3) Pengaturan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh otoritas publik dan bukan apa yang diyakini atau perlu dilakukan oleh otoritas publik.
- 4) Strategi bisa positif atau negatif.
- 5) Pendekatan publik dalam struktur positifnya bergantung pada regulasi dan bersifat definitif.

b. Jenis Jenis Kebijakan Publik

James Anderson dalam Siti Marwiyah (2022:13-14) menyampaikan katagori kebijakan publik sebagai berikut :

- 1) Kebijakan *substantif* versus kebijakan *prosedural*
Kebijakan substantif yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan *prosedural* adalah bagaimana kebijakan tersebut dapat dijalankan.
- 2) Kebijakan *distributif* versus kebijakan *regulatori* versus kebijakan *redistributif*
Kebijakan *distributif* menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan *regulatori* merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan, kebijakan *redistributif* merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.
- 3) Kebijakan material versus kebijakan simbolik
Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya komplet pada kelompok sasaran. Sedangkan, kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.

- 4) Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*)

Kebijakan *public goods* adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan, kebijakan *privat goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

c. Tahapa-Tahapan Kebijakan Publik

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William N. Dunn dalam Siti

Marwiyah (2022:14-16) adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda merupakan sebuah proses yang sangat strategis dalam realitas dalam mengatur kebijakan publik. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan sering disebut juga sebagai masalah kebijakan publik, biasanya muncul karena telah terjadi saling berpendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang sudah selesai atau akan ditempuh mengenai karakter permasalahan tersebut.

- 2) Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan merupakan masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan, setelah itu masalah didefinisikan untuk dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat di pilih sebagai kebijakan yang di ambil untuk memecahkan masalah.

- 3) Adopsi/*Legitimasi* Kebijakan

ialah memberikan otorisasi pada proses pemerintahan. Jika tindakan *legitimasi* dalam suatu masyarakat di atur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sudah direncanakan harus didukung. *Legitimasi* dapat dikelola melalui manipulasi symbol itu namun dimana melalui proses bagi warga negara belajar untuk mendukung pemerintah.

- 4) Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia.

- 5) Evaluasi Kebijakan/Penilaian

Evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, programprogram yang diusulkan untuk

menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

3. Implementasi kebijakan

a. Pengertian Implementasi kebijakan

Menurut Leo Agustino (2019:126) implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan, dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena ujudnya intervensi berbagai kepentingan.

Implementasi kebijakan publik sebagai tindakan dalam keputusan sebelumnya. Tindakan ini mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam waktu kurun maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan mencapai tujuan yang telah diterapkan. (Van Meter dan Van Horn dalam Siti Marwiyah 2022:36).

Menurut Arafat (2023:47) implementasi kebijakan adalah tahap dalam siklus kebijakan dimana keputusan kebijakan yang telah diambil diterjemahkan menjadi tindakan konkret dalam rangka mencapai tujuan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan melibatkan pelaksanaan program-program, kegiatan-kegiatan dan langkah-langkah operasional yang dirancang untuk mencapai hasil yang diinginkan.

b. Implementasi Kebijakan Model George C. Edward III

Berdasarkan Pandangan Edwards III dalam Reno Affrian (2023:38-40) keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor penting yaitu:

1) Komunikasi kebijakan

Faktor ini merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*), komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi penyampaian informasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*). Dimensi *transmission* yaitu menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan. Sementara itu, dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana agar sasaran kebijakannya dapat diterima dengan jelas sehingga mereka mengetahui apa yang menjadi maksud dan tujuan dari kebijakan. Terakhir, dimensi konsistensi (*consistency*) yaitu perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan.

2) Sumber daya

Meski ketentuan atau aturan jelas dan konsisten tetapi para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab kurang memiliki sumber daya, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Dimensi sumber daya terdiri dari tiga, yaitu manusia (*staff*), peralatan (*facilities*), serta informasi dan kewenangan (*information and authority*).

Dimensi sumber daya manusia adalah efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur) yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan. Sementara itu, dimensi sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan. Selanjutnya, dimensi informasi dan kewenangan adalah informasi yang relevan dan cukup tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. Kewenangan sangat diperlukan terutama untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijaksanaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3) Disposisi

Disposisi merupakan karakteristik yang menempel erat kepada pelaksana. Disposisi terdiri dari pengangkatan birokrasi (*staffing the bureaucracy*) dan insentif (*incentives*). Dimensi pengangkatan birokrasi merupakan pengangkatan dan pemilihan pegawai pelaksana kebijakan. Orang-orang yang dipilih harus memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. Dimensi insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan pemberian penghargaan, baik uang maupun bentuk apresiasi lainnya.

4) Struktur birokrasi

Keempat yaitu struktur birokrasi. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek penting dari setiap organisasi adalah adanya standard operating procedures (SOP). SOP akan menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak. Tidak jelasnya SOP di antara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya akan berdampak pada gagalnya pelaksanaan suatu kebijakan. Dimensi fragmentation merupakan organisasi pelaksana yang terpecah-pecah atau tersebar akan menjadi distorsi dalam pelaksanaan kebijakan. Semakin terfragmentasi organisasi pelaksana, koordinasi yang dibutuhkan semakin intensif.

4. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Menurut Bambang Sunggono dalam Siti Marwiyah (2022:43-44) implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

a. Isi Kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana dan penerapan prioritas, atau program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat,

penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan kaitannya dengan sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

b. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian Potensi

Sebab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana.

5. Tempat Pengelolaan Sampah 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*)

a. Pengelolaan Sampah

Pemerintah kabupaten Hulu Sungai Utara melalui peraturan daerah Nomor 16 tahun 2013 menetapkan bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan secara

sistematis, terpadu, dan berkelanjutan dengan Pengurangan, Pemanfaatan kembali, serta Pembinaan Bank Sampah.menerapkan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle), guna meningkatkan kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, serta mendorong manfaat sampah sebagai sumber daya yang bernilai.

Pengelolaan sampah adalah proses menangani sisa kegiatan manusia agar tidak menimbulkan masalah bagi lingkungan maupun kesehatan, kegiatan dimulai dari pemilahan antara bahan organik dan anorganik lalu dilanjutkan dengan pengumpulan serta pengangkutan ke tempat penanganan. Tujuan agar buangan tidak menumpuk sembarangan dan tidak mencemari tanah, air, maupun udara disekitar kehidupan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, limbah yang masih bisa dimanfaatkan biasanya diolah kembali melalui daur ulang atau digunakan ulang menjadi barang berguna. Sisa makanan dan daun dapat dijadikan kompos, sedangkan plastik,kertas serta logam bisa diproses menjadi produk baru, cara ini membantu mengurangi jumlah kotoran yang berakhir ditempat pembuangan akhir.

Pengelolaan sampah selama ini dilakukan dengan menerapkan sistem kumpul, angkut, buang. Sampah yang berasal dari masyarakat maupun kawasan hanya dikumpulkan di suatu tempat, alu diangkut dan langsung dibuang di tempat pembuangan akhir sampah. Sampah dibuang di TPA tanpa ada pengelolaan lebih lanjut yang bisa menyebabkan pencemaran lingkungan.

Pengelolaan sampah mengandalkan sistem *end of pipe solution* yang menitikberatkan pada pengolahan sampah, ketika sampah tersebut telah dihasilkan. Kegiatan yang dilakukan adalah pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir sampah (TPA). Yudianto, dkk (2019:9).

b. Konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*)

3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) merupakan pengelolaan sampah yang menekankan upaya pengendalian sampah sejak dari sumbernya agar jumlah limbah yang dihasilkan tidak berlebihan dan tidak mencemari lingkungan. Prinsip ini sangat penting diterapkan karena sampah rumah tangga, pasar, maupun aktivitas lainnya terus bertambah setiap hari. Tanpa pengelolaan yang baik, sampah dapat menimbulkan bau, merusak pemandangan, menyumbat saluran air, menyebabkan banjir, hingga memicu munculnya penyakit. Oleh karena itu, 3R hadir sebagai pendekatan sederhana namun efektif yang dapat dilakukan oleh siapa saja, baik individu, keluarga, maupun masyarakat luas.

1) *Reduce* (mengurangi)

Merupakan usaha membatasi penggunaan barang yang dapat menghasilkan sampah. *Reduce* bukan berarti tidak boleh menggunakan barang sama sekali, melainkan lebih pada memilih secara bijak. Contohnya membeli produk dengan kemasan minimal, membawa wadah makan sendiri, menggunakan tas kain saat berbelanja, serta menghindari barang sekali pakai seperti sedotan plastik atau styrofoam. Kebiasaan ini sangat berpengaruh

karena semakin sedikit barang yang digunakan, semakin sedikit pula sampah yang dihasilkan. *Reduce* dianggap sebagai langkah paling utama dalam 3R karena pencegahan sejak awal jauh lebih efektif daripada menangani sampah setelah terbentuk.

2) *Reuse* (menggunakan kembali)

Memanfaatkan barang yang masih layak pakai tanpa harus melalui proses pengolahan. Banyak barang sebenarnya masih bisa digunakan walaupun fungsi awalnya sudah selesai. Misalnya botol kaca dapat dijadikan wadah bumbu, kaleng bekas bisa menjadi tempat alat tulis, dan kantong plastik dapat dipakai kembali untuk belanja. Kebiasaan ini membantu mengurangi kebutuhan membeli barang baru sehingga menghemat biaya sekaligus menekan jumlah limbah. *Reuse* juga melatih kreativitas masyarakat karena barang bekas dapat diubah menjadi benda yang bermanfaat dan menarik.

3) *Recycle* (mendaur ulang)

Mengolah sampah menjadi produk baru melalui proses tertentu. Sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering dapat diolah menjadi kompos untuk pupuk tanaman. Sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan logam bisa diproses kembali menjadi bahan baku produk lain. Daur ulang biasanya memerlukan pemilahan sampah terlebih dahulu agar prosesnya lebih mudah dan hasilnya berkualitas. Selain mengurangi volume sampah, kegiatan ini juga memiliki nilai ekonomi karena hasil daur ulang dapat dijual atau dimanfaatkan kembali.

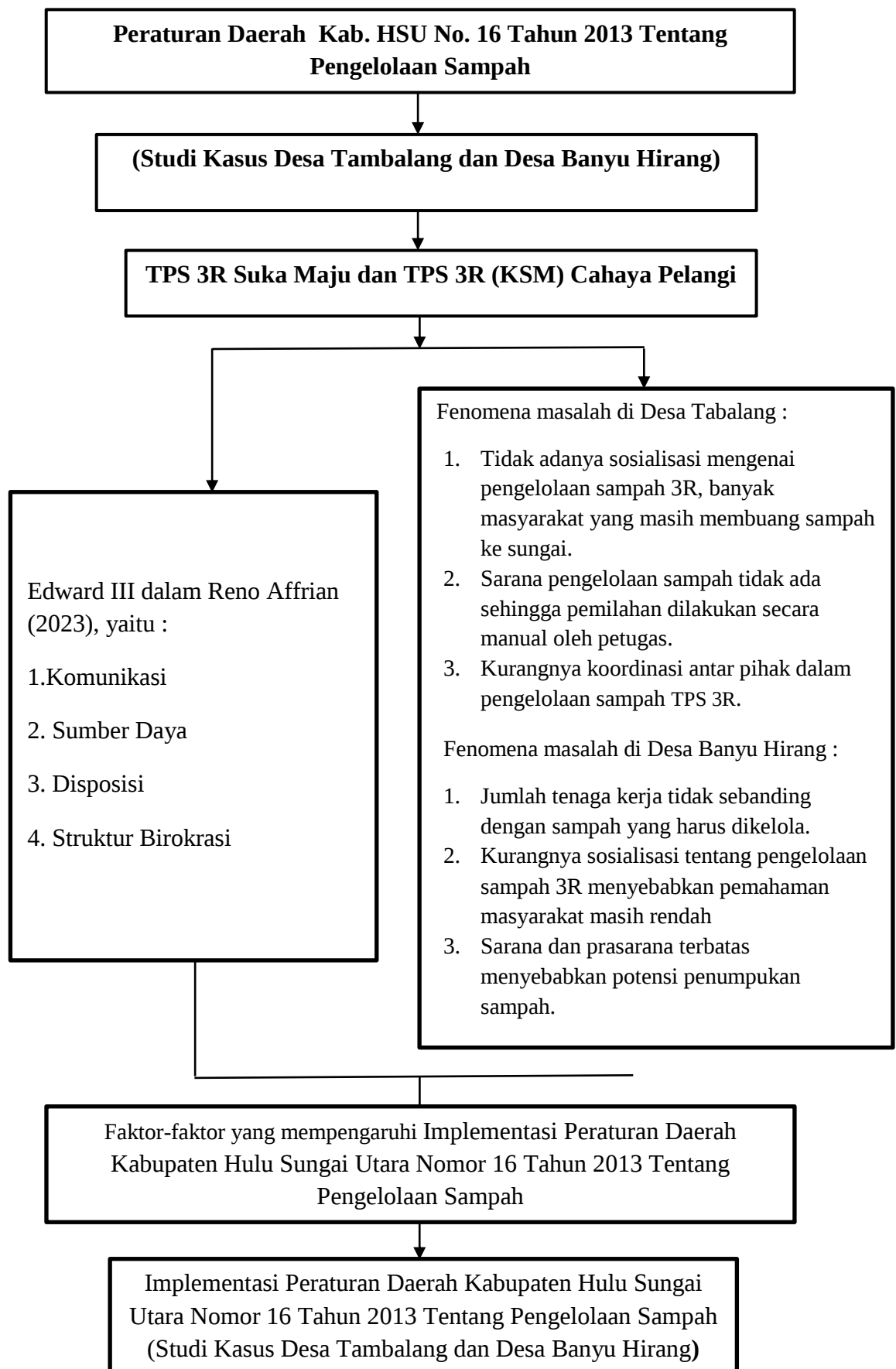
Penerapan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) tidak hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, tetapi juga berpengaruh pada keberlanjutan sumber daya alam. Dengan mengurangi penggunaan barang baru, kebutuhan bahan baku dari alam dapat ditekan sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalkan. Di tingkat masyarakat, penerapan konsep ini juga dapat meningkatkan kesadaran bersama tentang pentingnya menjaga lingkungan, menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial, serta memperkuat kerja sama dalam kegiatan pengelolaan sampah. Jika dilakukan secara konsisten, 3R mampu menjadi solusi sederhana namun efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.

C. Kerangka Pemikiran

Menurut Andri Kurniawan (2021:67) Kerangka pemikiran menggambarkan alur pemikiran penelitian dan memberikan penjelasan kepada pembaca mengapa mempunyai anggapan seperti hipotesis, kerangka berfikir disajikan dengan bagan yang menunjukkan alur pikir peneliti serta keterkaitan antara variabel yang diteliti.

Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini disusun untuk menganalisis secara mendalam proses pelaksanaan tempat pengelolaan sampah (Studi Kasus Desa Tambalang dan Desa Banyu Hirang), Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III, sehingga penulis menyusun kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan. Lokasi yang menjadi objek dari penelitian yaitu pada Tempat Pengelolaan Sampah 3R Suka Maju Desa Tambalang dan Tempat Pengelolaan Sampah 3R (KSM) Cahaya Pelangi Desa Banyu Hirang, Kabupaten Hulu Sungai Utara.

B. Pendekatan Penelitian

Metode Kualitatif adalah cara atau pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami suatu fenomena secara mendalam dengan menggali makna, proses, dan pengalaman dari sudut pandang subjek peneliti. Metode ini berfokus pada data non-numerik seperti kata-kata, dokumen, perilaku, simbol atau interaksi sosial.

Menurut Bogdan R. & Taylor S.J dalam Ratnaningtyas, dkk (2021:16) penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif, misalnya ucapan, perilaku, atau tulisan yang berasal dari subjek penelitian yang diamati.

Menurut Creswell dalam Eko Murdiyanto (2020:19) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambar kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.

Menurut Sugiyono (2017:207) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

C. Tipe Penelitian

Penelitian merupakan proses yang panjang, penelitian berawal dari minat yang ada dalam diri seseorang untuk memahami fenomena tertentu yang kemudian berkembang menjadi ide, teori, dan konsep. Tipe penelitian berfungsi untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Desa Tambalang dan Desa Banyu Hirang). Ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang berusaha menggambarkan, menjelaskan dan menguraikan suatu keadaan atau fenomena.

Menurut Hidayat Syah dalam Samsu (2021:65) bahwa penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa tertentu.

Menurut Hardani, dkk (2020:54) penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis.

Menurut widodo (2023:40) Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sesuatu secara rinci. Penelitian ini dapat digunakan untuk menggambarkan profil sosio-demografis responden,

menggambarkan pola hubungan antara variabel-variabel tertentu, atau menggambarkan karakteristik suatu fenomena.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Menurut Emzir dalam Sapto Haryoko, dkk (2020:119) data adalah bagian-bagian khusus yang membentuk dasar-dasar analisis dalam pengelolaan dan menganalisis sekumpulan data. Data meliputi apa saja yang dicatat orang secara aktif selama studi riset, seperti transkrip wawancara dan catatan lapangan observasi, data juga termasuk apa yang diciptakan orang lain dan yang ditemukan peneliti di dalam konteks penelitiannya, seperti catatan harian, rekaman-rekaman gambar atau suara, dokumen resmi, fotograf, artikel surat kabar, dan sebagainya.

a. Data Primer

Data yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang telah ditentukan. Langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara yaitu mengajukan beberapa pertanyaan terhadap informan yang berkaitan dalam penelitian dengan cara wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian, berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data yang relevan dengan permasalahan yang ada, yang diteliti dan diperoleh dari buku atau penelitian kepustakaan untuk mendukung penelitian ini.

2. Sumber Data

Menurut Satori dalam Ibrahim (2015:69) sumber data bisa berupa benda, orang maupun nilai, atau pihak yang dipandang mengetahui

tentang *social situation* dalam obyek material penelitian (sumber informasi).

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik penentuan informan menggunakan metode purposive sampling yaitu cara memilih informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Teknik ini digunakan agar informan yang dipilih benar-benar memahami dan terlibat dalam pelaksanaan program, sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan relevan.

Dalam informan penelitian ini berjumlah 12 orang informan terdiri dari :

Tabel 3. 1
Tabel Informan

Jabatan	Jumlah
Kepala Desa Tambalang	1
Ketua Pengurus TPS 3R Suka Maju Desa Tambalang	1
Sekretaris TPS 3R Suka Maju Desa Tambalang	1
Bendahara TPS 3R Suka Maju Desa Tambalang	1
Pekarya TPS 3R Suka Maju Desa Tambalang	1
Masyarakat Desa Tambalang	4
Kepala Desa Banyu Hiran	1
Ketua Pengurus TPS 3R (KSM) Cahaya Pelangi Desa Banyu Hiran	1
Sekretaris TPS 3R (KSM) Cahaya Pelangi Desa Banyu Hiran	1

Bendahara TPS 3R (KSM) Cahaya Pelangi Desa Banyu Hiran	1
Pekerja TPS 3R (KSM) Cahaya Pelangi Desa Banyu Hiran	1
Mayarakat Desa Banyu Hiran	4
Jumlah	18

E. Definisi Operasional Variabel

Menurut Imam Machali (2021:62) Definisi operasional variabel dimaksudkan untuk menjelaskan makna variabel yang sedang diteliti dalam perspektif peneliti berdasarkan eksplorasi teori-teori yang telah difahami. Definisi operasional variabel ini menjadi unsur penting yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel yang diteliti. Definisi operasional variabel mengatasi kesulitan melakukan pengukuran terhadap definisi konseptual, karena variabel yang hendak diukur masih berada dalam pikiran peneliti.

Dalam definisi operasional variabel, peneliti mengeluarkan konsep variabel yang ada dalam pikirannya kedalam definisi yang memungkinkan semua pengamat dapat melakukan pengamatan terhadap variabel dengan pemahaman yang sama karena dengan jelas menyatakan cara pengukuran dan alat yang diperlukan untuk melakukan pengukuran. Oleh karena itu, definisi operasional merupakan definisi yang dibuat berdasarkan definisi konseptual yang merupakan pernyataan mengenai variabel, cara pengukuran dan alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran.

Desain operasional penelitian dapat peneliti sajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Implementasi Kebijakan Edwards III dalam Reno Affrian (2023).	1. Komunikasi	a. Kejelasan informasi b. Penyampaian informasi c. Konsekuensi/ketetapan
	2. Sumber Daya	a. Staf b. Fasilitas
	3. Disposisi	a. Komitmen b. Sikap/respon
	4. Struktur Birokrasi	a. SOP b. Koordinasi

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2023:104) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data. Berikut ini akan diuraikan pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Bungin dalam Ibrahim (2015:83) observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra seperti telinga, hidung, mulut dan kulit, karena itu observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2023:106) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas.

2. Wawancara

Wawancara menurut Moleong dalam Sapto Haryoko, dkk (2020:165) adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang melibatkan dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan suatu pertanyaan dan terwawancarayang memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan itu.

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan melakukan dialog atau percakapan langsung antara peneliti dengan orang yang diwawancarai berkaitan dengan topik penelitian. Wawancara juga diartikan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan gagasan melalui teknik tanya jawab yang pada akhirnya akan menghasilkan konstruksi makna tentang topik tersebut. Naidin Syamsuddin, dkk (2023:77).

3. Dokumentasi

Menurut ibid dalam Samsu (2021:99) dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.

Menurut Gottschalk dalam Eko Murdiyanto (2020:64) menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berarti berupa setiap proses pembuktiaan yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran atau arkeologi.

G. Teknik Analisis Data

Menurut patton dalam Ibrahim (2015:107) analisis data kualitatif adalah suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, katagori, dan suatu uraian dasar, hingga proses penafsiran. Dalam konteks analisis menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian.

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Amtai Alaslan (2021:86) adalah upaya yang dilakukan untuk menyusun data secara sistematis terhadap data yang diperoleh melalui hasil wawancara, catatan lapangan dan teknik lainnya sehingga mudah untuk dipahami. Proses analisisnya dilakukan dengan cara mengatagorisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusunnya dan menemukan pola, memilah mana yang penting untuk dipelajari, barulah kemudian dibuat kesimpulan untuk diceritakan ke orang lain.

Menurut Miles dan Huberman dalam Hardani, dkk (2023:163-177) mengemukakan bahwa metode atau teknik pengolahan data kualitatif dapat dilakukan melalui tiga tahap, yakni:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data,

data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara melalui seleksi ketat. Melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcard dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Menarik Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan sifatnya masih sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila bukti yang valid dan konsistensaat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

H. Uji Kredibilitas Data

Menurut Sugiyono (2023:185) Uji kredibilitas data dapat dilakukan melalui beberapa cara di antaranya: memperpanjang pengamatan, peningkatan ketekunan, melakukan triangulasi data, berdiskusi dengan rekan sejawat, menggunakan bahan referensi, serta melakukan member check.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan empat teknik utama untuk menguji kredibilitas data, yaitu:

1. Memperpanjang Pengamatan

Peneliti kembali ke lapangan untuk memperdalam observasi, melakukan wawancara ulang dengan informan yang sama, maupun menggali informasi dari sumber baru, sehingga data yang diperoleh lebih lengkap dan mendalam.

2. Peningkatan Ketekunan

Pengamatan terus menerus yaitu bahwa peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci terhadap faktor-faktor yang menonjol. Kemudian menelaahnya secara rinci pada suatu titik sehingga pemeriksaan tahap awal atau seluruh faktor yang ditelaah sudah dipahami.

3. Triangulasi

Triangulasi dilakukan dengan memeriksa data dari berbagai sumber, menggunakan beragam teknik, dan pada waktu yang berbeda. Misalnya, selain wawancara dan observasi, data juga diperkuat dengan dokumentasi berupa foto. Peneliti memadukan observasi, wawancara, serta dokumentasi untuk mendapatkan data yang lebih akurat.

4. Pemeriksaan Teman Sejawat (menggunakan bahan referensi dan data dukung dukungan hasil wawancara)

Bahan referensi adalah bahan pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen-dokumen autentik sehingga data yang diperoleh dapat menjadi lebih dipercaya.

5. Menganalisis Kasus Negatif

Menganalisis kasus negatif yaitu dilakukan dengan jalan mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan pembandingan.

6. Member Check

Member check dilakukan dengan cara menyerahkan data atau transkrip hasil wawancara kepada informan untuk ditinjau kembali. Proses ini bertujuan memastikan bahwa data yang ditafsirkan peneliti sesuai dengan maksud sebenarnya dari informan, sehingga menghindari kesalahan interpretasi dan meningkatkan validitas hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2013). Peraturan Daerah (Perda) No. 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Anonim. (2008). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Affrian, R. (2023). *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.
- Agustino, L. (2019). *Dasar-Dsar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Alaslan, A. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Al-Haq, A. B., & Sukmana, H. (2025). Implementasi Program Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R (Reduce, Reuse, Recycle): Studi Kasus ESA Sedati Gede Kecamatan Sedati Sidoarjo. *Publicuho*, hlm 555-568.
- Arafat. (2023). *Kebijakan Publik (Teori dan Praktik)*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grub.
- Engkus. (2022). *Kebijakan Publik (Konsep, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi serta perubahan)*. Jawa Barat: PT. Kimshafi Alung Cipta.
- Hardani. *Et al.* (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Haryoko, S. *Et al.* (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri.
- Ibrahim. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pontianak: Perpustakaan Nasional.
- Kendi, I. K. (2024). *Implementasi Kebijakan Publik (Aktor, Perangkat, Manajemen dan Isu-Isu Otonomi Khusus Papua)*. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Kurniawan, A. *Et al.* (2021). *Metodologi Penelitian*. Cirebon: Insania.
- Machali, I. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.
- Marwiyah, S. (2022). *Kebijakan Publik (Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis dan evaluasi kebijakan publik)*. Universitas PGRI Madiun.

- Mukti, N. N. (n.d.).(2024) Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Tempat Pengelolaan Sampah Reduce,Reuse,Recycle (TPS 3R) di Kabupaten Purbalingga. *Ilmiah Ilmu Pemerintah*, hlm 1-15.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.
- Najwa, N. N., Supriyanto, D., & Anadza, H. (2025). Implementasi Pengelolaan Sampah Berbasis Reduce, Reuse, Recycle (3R)(Studi pada Tempat Pengelolaan Sampah 3R Bersama, Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang). *Respon Publik*, hlm 40-46.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ratnaningtyas, E. M. *Et al.* (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Aceh: Yayasan penerbit Muhammad Zaini.
- Rodiyah, I. *Et al.* (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Sidoarjo: Umsida Press.
- Samsu. (2021). *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif,Kuantitatif,Mixed Methods serta Research & Development)*. Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kebijakan*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Supriyatno, D. *Et al.* (2024). *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Syamsuddin, N. *Et al.* (2023). *Dasar-Dasar Metode Penelitian Kualitatif*. Lombok: Yayasan Hamjah Diha.
- Widodo, S. *Et al.*(2023). *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. Pangkalpinang: CV. Science Techno Direct.
- Yodiyanto. *Et al.* (2019). *Pengelolaan Sampah*. Metro: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.